



# Dorong ITF Sampah Bawuran Segera Beroperasi

## Pemda DIY Tagih Komitmen Kabupaten/Kota

**YOGYA (KR)** - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengumpulkan seluruh bupati/walikota di DIY untuk membahas percepatan penang-

gulangan sampah di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (24/7). Dalam pertemuan tertutup sekitar tiga jam tersebut, Sultan

memberikan arahan sekaligus mendengar langsung persoalan yang dihadapi kabupaten/kota berkaitan dengan penerapan desentralisasi sampah. Sultan ju-

ga meminta agar Intermediate Treatment Facility (ITF) Bawuran di Bantul segera beroperasi. Karena nantinya ITF Bawuran akan mengolah sampah menja-

di beragam produk yang bernilai, seperti mebel. Namun, sampah yang dikirim ke Bawuran harus sampah yang bisa diolah. "Soal aspek ekonomi sampah

yang telah dipilah itu harusnya bisa dibawa ke ITF Bawuran. Di lokasi itu nantinya, diharapkan ada proses pengolahan sampah  
 \* Bersambung hal 7 kol 1

### Pemda

Sambungan hal 1

menjadi bahan baku industri baik berupa mebel maupun lainnya. Dari proses pemilahan itu kemudian masuk ke Bawuran jadi bahan baku, berproses menjadi barang lain itu pertonnya dihargai Rp 450.000. Jadi sampah itu bukan buangan tapi punya arti komersial. Dengan demikian, ada harga yang dibayarkan pada aktivitas pengolahan sampah dari tingkat rumah tangga atau kalurahan," kata Sultan usai pertemuan.

Sultan mengungkapkan, Pemda DIY telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PTI) untuk membantu percepatan persoalan sampah. Bantuan PTI bentuknya bisa beragam baik dalam hal pendanaan maupun manajemen program. Dimana ada dua hal yang harus diperhatikan kabupaten/kota dalam penanganan sampah. Pertama, pemilahan dari tingkat rumah tangga. Kedua, perkembangan ITF Bawuran dan Peran PTI.

"Saya berharap warga masyarakat yang sekarang mau mengelola sampah itu jangan meninggalkan pemulung, karena pemulung juga butuh makan. Jangan yang jadi pemulung warga masyarakat di kalurahan, tapi harus kerja sama dan itu nanti diolah," ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono mengungkapkan, dalam rapat koordinasi itu pihaknya sempat menagih komitmen kabupaten/kota dalam proses penanggulangan sampah. Pihak kabupaten/kota diminta memaparkan perkembangan program penanggulangan sampah, kapasitas tempat pengolahan sampah mandiri dan proyeksi kerja sama dengan wilayah lain jika daerah itu belum mampu mengolah sampah secara mandiri. Pihaknya juga mempertemukan kabupaten/kota dengan PT PII yang ke depan akan memfasilitasi proses penyelesaian masalah sampah. BUMN di bawah Kemenkeu itu nantinya tidak hanya mendukung dari sisi anggaran secara langsung, tetapi juga pada penyusunan program desentralisasi sampah maupun pendampingan teknis dan manajemen kepada kabupaten/kota di DIY.

"Adapun untuk ITF Bawuran, membutuhkan sedikitnya Rp 400 miliar biaya pembangunan untuk bisa beroperasi. Kerja sama dengan pihak ketiga sifatnya berbentuk pendanaan hijau. Hanya saja perlu penyertaan dana dari Pemerintah setempat sebesar 20 persen," kata Sekda.

"Pendanaan hijauanya dari Amerika Serikat yang kemudian kerja sama dengan Taiwan. Dana 20 persen dari Pemerintah Daerah itu

kan sangat besar, makanya Pemkab Bantul perlu pihak lain," paparnya.

Sementara Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan, Pemkab Bantul sudah menjalin kerja sama dengan Pemkot Yogya tentang pemanfaatan ITF Bawuran. Bahkan pihaknya akan berupaya mempercepat operasional sejumlah TPST mandiri di wilayahnya terlebih dahulu. Dengan begitu bisa fokus pada penyelesaian persoalan sampah khususnya di Bawuran dapat dipercepat.

"Kami targetkan September sejumlah TPST bisa dipakai dan beroperasi penuh. Nantinya ITF Bawuran yang dikelola BUMD tentu harus menggunakan prinsip bisnis dalam operasionalnya. Jadi ada insentif dan disinsentif," ujarnya.

Sedangkan Pj Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyatakan, produksi sampah yang belum dikelola di Kota Yogyakarta tinggal 60 ton dari total 200 ton perhari. Karena itu pihaknya berharap ITF Bawuran bisa segera beroperasi. Dengan begitu sisa sampah yang belum diserap dapat dibuang ke lokasi tersebut sambil terus mengoptimalkan kapasitas tiga TPST yang sudah berjalan yakni Kranon, Nitikan, Karangmiri dan TPA Piyungan. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005